

PERAN PENYULUH DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA DI ACEH BESAR

ROLE OF DISHIBITORS IN DISSEMINING INFORMATION ON FAMILY PLANNING IN ACEH BESAR

Bustamam Ali ¹, Amrullah ²

^{1 2}Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

E-mail: bustamamali48@gmail.com

Diterima: 18/02/2020;; Disetujui: 15/03/2020

ABSTRAK

Jumlah penduduk yang besar merupakan masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk didalamnya adalah persebaran tidak merata, dan kualitas rendah. Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan di Indonesia, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan Kuta Baro, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Kecamatan Kuta Baro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data utama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB mengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di Kecamatan Kuta Baro, dengan cara melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan konseling yang berisikan mengenai program- program guna mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat peserta KB. PKB menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Kecamatan Kuta Baro. Ini terlihat dari pola penyampaian pesan dimana PKB merupakan top management untuk memberikan informasi mengenai program-program kepada masyarakat melalui Pos KB untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak di kecamatan, PKB diharapkan mampu bekerja sesuai koridor dan tupoksi dimana PKB harus memiliki wawasan dan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh, Keluarga Berencana, Informasi.

ABSTRACT

Large population is a population problem faced by developing countries including uneven distribution, and low quality. To overcome the problem of population development in Indonesia, there is a need for government regulations and policies. This study aims to examine the role of family planning counselors (PKB) in Kuta Baro Subdistrict, to find out what efforts have been made in order to mobilize community participation in the National KB program in Kuta Baro Subdistrict. This study uses qualitative methods with the main data collection tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that PKB managed the implementation of the National KB Program activities in Kuta Baro Subdistrict, by conducting several counseling and counseling activities that contained programs to improve the welfare of family and community members of KB participants. PKB became the driving force for community participation in the National KB program in Kuta Baro District. This can be seen from the pattern of delivering messages where PKB is the top management to provide information about programs to the public through the KB Post to be published to the public. As the spearhead in the sub-district, PKB is expected to be able to work according to the corridors and duties where PKB must have insight and ability to communicate well with the community.

Keywords: Roles, Extension, Family Planning, Information.

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Negara-Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata, dan kualitas rendah.¹ Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik harus diimbangi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui keberhasilan program keluarga berencana yang harus dilaksanakan, karena jika program tersebut tidak terlaksana dengan baik akan mengakibatkan laju penduduk yang tidak seimbang dan berimbas pada berbagai aspek

penting pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan nasional.

Kabupaten Aceh Besar, dalam hal permasalahan kependudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Aceh Besar memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan jumlah penduduk. BPMPKB Kabupaten Aceh Besar memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai kependudukan dan bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Banten yang memberikan fasilitas kepada BPMPKB Kabupaten Aceh Besar baik membina, membimbing, memberikan sarana dan prasarana

untuk menunjang program Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Aceh Besar.

BPMPKB menjadi sebuah praktik nyata untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana masyarakat Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dan tentunya turut memberikan sebuah kontribusi untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program Keluarga Berencana.

Dalam setiap kecamatan terdapat Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berperan penting sebagai pengelola, penggerak, memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang ikut ambil dalam pelaksanaan program KB. Dalam praktiknya PKB sering banyak sekali menemukan banyak permasalahan di lingkungan masyarakat. Permasalahan umum yang sering dijumpai adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dengan baik. Permasalahan komunikasi pun sering menjadi ulasan, misalnya bagaimana seorang PKB harus mampu mengubah mindset masyarakat di sebuah daerah/Gampong untuk menggunakan program KB.

Terdapat beberapa program KB yang diberikan kepada masyarakat melalui Penyuluh Keluarga Berencana diantaranya ; Intra Uterine Device (UID), Metode Operasi Wanita (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW), Implan, Suntik,

Pil dan Kondom. Program-program tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan dan menahan laju penduduk yang berlebihan dari waktu ke waktu. Masyarakat berhak memilih programnya sendiri agar mengikuti program KB.

Di Kecamatan Kuta Baro misalnya, bagaimana PKB mampu menekan laju pertumbuhan penduduk jika masyarakatnya masih banyak yang tidak menggunakan program KB, dan bagaimana seorang PKB harus mampu menegaskan sebuah pemahaman masyarakat yang kadang masih bersifat tradisional. Secara geografis Kecamatan Kuta Baro terletak di Aceh Besar. Aceh Besar termasuk kedalam tempat yang sangat sakral dan kuat akan kebudayaan, istiadat dan agamanya.

Di Kecamatan Kuta Baro masih sering dijumpai keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, bahkan usia 30 tahun ada yang sudah memiliki anak. Ini sangat bertolak belakang dengan visi yang diusung oleh Pemerintah dalam Program Keluarga Nasional yaitu “dua anak cukup”. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) harus memiliki wawasan yang luas dan mampu memiliki karisma agar dipercaya oleh masyarakat ketika melakukan sebuah penyuluhan atau konseling dengan komunikasi yang baik.

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari

kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Selain itu komunikasi diartikan pula sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan. Atau dapat diartikan bahwa komunikasi adalah saling menukar pikiran atau pendapat.

Menurut Hovland dalam Widjaja (2010: 26) mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa lambang kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi, dengan demikian komunikasi itu adalah persamaan pendapat dan untuk kepentingan itu maka orang harus mempengaruhi orang lain terlebih dahulu, sebelum orang lain itu berpendapat, bersikap, dan bertindak laku yang sama dengan kita.

Rogers dan D. Lawrence Kincaid dalam Cangara (2012: 20) menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Komunikasi memiliki unsur-unsur penting didalamnya. Unsur tersebut sangat berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah interaksi komunikasi. Menurut Widjaja (2010: 60) beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalam komunikasi, diantaranya: (1) *Unsur Sumber*, Sumber adalah dasar yang digunakan dalam

penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan dokumen, ataupun sejenisnya. (2) *Unsur Komunikator*, Komunikator adalah setiap orang ataupun kelompok dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai suatu proses, dimana komunikator dapat menjadi komunikan, dan sebaliknya. Komunikator sebagai pemberi pesan kepada komunikan. Komunikan sebagai penerima pesan dari komunikator, (3) *Unsur Pesan*, Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan ingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu. Bentuk-bentuk pesan komunikasi antara lain:

a) *Informatif*

Informative communication adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik ini berdampak kognitif pasalnya komunikan hanya mengetahui saja. Seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik, pada teknik informatif ini berlaku komunikasi satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan,

serta komunikannya heterogen. Biasanya teknik informatif yang digunakan oleh media bersifat asosiasi, yaitu dengan cara menumpangkan penyajian pesan pada objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak.

Dalam penelitian ini terlihat penyampaian pesan secara informatif seperti dalam penyampaian pesan oleh PKB dalam kegiatan penyuluhan di Posyandu, PKB menjelaskan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi secara kelompok kepada masyarakat tentang cara penggunaan alkon yang dapat dipilih oleh calon peserta KB-Baru.

b) Persuasif

Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan mempergunakan komponen-komponen ilmu komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil pengindraannya terorganisasi secara mantap dan terpadu. biasanya teknik ini afektif, komunikan bukan hanya sekedar tahu, tapi

tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu.

Seperti diungkapkan dalam penjelasan komunikasi persuasif lebih menekankan pada penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk mengubah sikap seseorang melalui pesan yang disampaikan. Komunikasi persuasif terlihat disaat kegiatan penyuluhan yang bersifat kunjungan *door to door*. Dalam penyuluhan secara *door to door* terlihat bahwa kegiatan komunikasi lebih menekankan pada aspek komunikasi interpersonal, dalam hal ini biasanya seorang komunikator dan komunikan akan lebih menjalin hubungan secara interpersonal dan persuasif karena pesan dimuat dan diarahkan lebih fokus kepada seseorang.

c) *Koersif/Instruktive Communication*

Komunikasi instruktif atau koersi teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sangsi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukannya secara terpaksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk. Serta tidak luput dari sifat *red- herring*, yaitu interest atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Teknik ini bisa digunakan oleh atasan terhadap bawahan-nya

yang menuntut adanya kedisiplinan kerja karyawannya.

Unsur berikutnya adalah (4) *Channel/Saluran*, yaitu saluran penyampaian pesan, biasa jg disebut dengan media. Media digunakan sebagai alat untuk penyampaian pesan kepada komunikan, dan (5) *Efek*, Efek adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah komunikasi. Efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Efek tersebut misalnya perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan lain sebagainya (Mulyana, 2007:69-71).

Pada konteks Keluarga Berencana (KB), Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplemntasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Salah satu NSPK sesuai amat UU 52/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan

Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38, yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota diamanatkan menetapkan formasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dan dilanjutkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dimana dalam program keluarga berencana merupakan urusan wajib dan masuk dalam rumpun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB tiap Kabupaten dan Kota harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, beban kerja, aspek demografi yaitu jumlah kepala keluarga, aspek teritori jumlah Gampong/Kecamatan dan aspek geografis yaitu luas wilayah. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh BKKBN tahun 2010, jumlah Petugas Lapangan secara nasional berjumlah 21.600 orang, jika dilihat secara kuantitas setiap

tahun tenaga PLKB/PKB trendnya selalu menurun, hal ini disebabkan karena proses penerimaan jabatan fungsional (PLKB/PKB) selama 15 tahun terakhir mulai tahun 1996 tidak ada formasi, dilanjutkan dengan penyerahan otonomi daerah banyak PLKB/PKB yang mutasi ke instansi lain, meninggal dunia dan pensiun.

Seperti diketahui rasio antara petugas lapangan KB dengan jumlah Kecamatan/Gampong adalah 1 PLKB/PKB idealnya membina 1 – 2 Gampong/Kecamatan, sampai tahun 2010 1 PLKB/PKB membina sampai dengan 4 Gampong/Kecamatan. Hasil evaluasi dan capaian secara nasional Program KB Nasional tahun 2004- 2009 cenderung stagnan Keberhasilan pelaksanaan Program KB Nasional telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan tersebut adalah sumber daya manusia yang potensial terutama ada tingkat lini lapangan yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik yaitu Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Komunikasi dinilai sebagai aspek yang penting ketika melakukan penyuluhan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Orang yang memberi pesan (Komunikator) dalam hal ini adalah Penyuluh

Keluarga Berencana (PKB) dan yang menerima pesan (Komunikan) adalah masyarakat. Dalam praktiknya PKB melakukan sosialisasi program KB di Kecamatan Kuta Baro dengan beberapa metode, contohnya: Sosialisasi seperti penyuluhan, konseling dan kunjungan ke rumah masyarakat atau Door to door. Dalam sistem kerjanya BPMPKB untuk melakukan sosialisasi di kecamatan bekerja sama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan bidan-bidan yang terdapat di Puskesmas atau Posyandu. Komunikasi menjadi sebuah modal awal yang sangat penting dalam sebuah sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kepada masyarakat. Disamping cara penyuluh melakukan komunikasi tentunya pesan yang disampaikan kepada masyarakat oleh Penyuluh Keluarga Berencana harus memiliki muatan pesan yang baik dan tentunya bersifat persuasif. Persuasif sendiri lebih bersifat seperti mengajak, inilah yang ditekankan oleh Penyuluh Keluarga Berencana yang berada di Kecamatan Kuta Baro agar masyarakat yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro mau untuk mengikuti program Keluarga Berencana Nasional, peran serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terkadang selalu mendapatkan beberapa hambatan ketika mensosliasikan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kuta Baro. Wawasan masyarakat yang dinilai masih awam dan kurang mengenal program Keluarga Berencana Nasional

menjadikan sebuah indikasi yang sangat besar dalam hambatan Penyuluh melakukan Sosialisasi. Dalam penelitian ini penulis melihat banyak sekali faktor yang memiliki dampak peran seorang PKB di Kecamatan Kuta Baro, peneliti ingin mengetahui lebih spesifik mengenai beberapa faktor internal maupun eksternal yang memiliki dampak yang besar kepada Peran PKB di Kecamatan Kuta Baro. Oleh karena, penulis mengkaji tentang bagaimana peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan Kuta Baro dan bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Kemukiman Cot Keu-eung Kecamatan Kuta Baro.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif dinilai sebagai metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya, peneliti ingin memperoleh sebuah jawaban secara mendalam melalui wawancara yang akan dilakukan.

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat menggali subyek, merasakan apa

yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Rurchan, 2012: 21-22).

Penelitian kualitatif deskriptif menurut Kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detil (untuk menggambarkan apa yang terjadi). Penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian namun belum memadai. Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, tentunya peneliti akan menggunakan informan dalam pemenuhan aspek tujuan penelitian. Informan diperlukan untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat. Informan digolongkan menjadi 2 jenis yaitu key informan dan informan pendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa metode guna untuk mengumpulkan data di Kecamatan Kuta Baro, teknik pengumpulan data meliputi (1) wawancara dengan key informan yaitu Penyuluh KB (PKB) di Kecamatan Kuta Baro lalu

informan sekunder yaitu perwakilan BPMPKB Kabupaten Aceh Besar, Pos dan Sub Pos KB Kecamatan Kuta Baro dan informan pendukung yaitu akseptor peserta KB-Baru dan beberapa tokoh masyarakat, (2) observasi lapangan di Kecamatan Kuta Baro, melihat bagaimana kondisi masyarakat di sana, apa saja permasalahan yang berhubungan dengan program KB di Kecamatan Kuta Baro, lalu peneliti akan melakukan observasi di kantor BPMPKB Kecamatan Kuta Baro untuk memperoleh informasi data yang akan diolah guna bahan masukan penelitian, dan (3) dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Setelah dilakukannya tahap pengumpulan data, penulis akan menganalisis data. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih nama yang penting dan nama yang akan

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ada tiga jalur analisis data kualitatif;

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kemukiman Cot Keu-eung Kecamatan Kuta Baro

Peran penyuluh KB yang ketiga membahas mengenai bagaimana seorang PKB melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini tentunya berkenaan dengan tujuan program KB itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari lapangan dimana ada beberapa masyarakat yang ikut KB menjadi masyarakat yang lebih mandiri dengan beberapa usaha-usaha yang dibuat oleh akseptor sendiri. Venny Damayanti mengemukakan:

“Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu program dimana anak-anak remaja yang orang tuanya mengikuti program KB diberikan pembinaan untuk mengetahui seluk beluk tentang program KB, lalu ada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).”

Dalam hal ini program KB bukan hanya terpaku kepada tujuan untuk menekan angka kelahiran, ternyata program KB tentunya memiliki tujuan dimana membuat para akseptornya menjadi lebih sejahtera, dengan akseptor mengikuti program KB, akseptor diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, guna kemajuan taraf hidup yang lebih layak agar menunjang perekonomian keluarga. Bapak Apai menjelaskan:

“Program KB kan tujuannya 2 anak cukup. Nah dengan faktor kemiskinan bisa dikurangi. Lalu ibu-ibu diarahkan untuk bidang UPPKS. Bidang UPPKS itu mengajarkan bahwa ibu-ibu diberikan pemahaman tentang bagaimana cari supaya hidup lebih mandiri. Contohnya ada yang bikin kue, makanan, dan kerajinan atau apa lalu diberdayakan oleh pihak KB. Sehingga keluarganya mampu menjadi lebih sejahtera. Kalo dulu kami berikan modal, sehingga ada kesibukan yang bersifat positif. Dengan banyaknya relasi mereka bisa maju dan berhasil.”

Penulis menemukan beberapa kesamaan informasi yang diperoleh dilapangan membahas mengenai pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh pihak BPMPKB mengenai seberapa efektif solusi pemberdayaan masyarakat bahwa “Ada kok yang sukses, contohnya ketika seorang akseptor yang sudah mandiri mampu bersosialisasi dan mampu berkomunikasi dengan baik menghasilkan relasi dengan baik.

Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dinilai sukses karena dengan menggunakan usaha seperti UPPKS, akseptor mampu menjadi pribadi yang lebih maju, mampu menunjang ekonomi keluarga, bahkan mampu membina relasi dengan baik dengan orang lain. Contoh realitasnya di Kecamatan Kuta Baro adalah Ibu Rumsiah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Venny Damayanti.

Bagaimana PKB melakukan pembinaan? Umumnya berawal dari beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan konseling yang dilakukan oleh PKB dan Pos KB dilapangan, lalu dilakukanlah komunikasi untuk mengetahui minat masyarakat dalam hal menunjang perekonomiannya, apa keahlian dan seberapa besar minat dan bakat seorang akseptor lalu pihak BPMPKB memberikan beberapa bantuan misalnya mengenai penyediaan modal. Seiring berjalannya waktu akseptor mampu menjadi seseorang yang lebih kompeten dan mandiri. Dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat seperti ini masyarakat menjadi lebih tahu mengenai program KB bukan hanya berputar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk saja melainkan peningkatan taraf hidup yang lebih baik

Jika berbicara hambatan tentunya akan kembali pada pembahasan mengenai kepada permasalahan utama dimasyarakat. Banyaknya dari beberapa masyarakat yang sangat kuat memegang teguh aspek keagamaan maka dari itu menghambat seorang PKB untuk melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat itu sendiri.

Berknaan dengan teori atribusi membagi menjadi beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Berkenaan dengan peran yang pemberdayaan masyarakat perilaku yang dilakukan oleh PKB dibentuk

dari sisi lingkungan yang dilihat dari Kecamatan Kuta Baro bahwa “Saya pula menilai di Kecamatan Kuta Baro ini sangat membutuhkan program KB karena masih banyak masyarakatnya yang hidupnya kurang kondusif dari sisi aspek keluargaan dan ekonomi. Maka dari itu perlunya masyarakat diberdayakan dengan baik.”

Dari penggalan wawancara diatas lingkungan memberikan motivasi kepada seorang PKB untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar kondisi keluarga mereka menjadi lebih kondusif dan perekonomian menjadi lebih baik sehingga terhindar dari kemiskinan.

2. PKB mengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di Kemukiman Cot Keu-eung Kecamatan Kuta Baro

Dalam peran yang keempat penulis akan lebih membahas bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang PKB untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program KB. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan umumnya lebih berpaku kepada pihak-pihak luar dari UPT BPMPKB Kecamatan Kuta Baro itu sendiri. Umumnya seperti Pos KB, bidan Gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun beberapa instansi yang dilibatkan didalamnya.

Untuk Pos KB dan bidan Gampong sendiri sudah kita bahas mengenai koordinasinya dalam poin-poin sebelumnya dimana PKB

bekerjasama dengan Pos/Sub KB dan bidan Gampong untuk sama-sama mensosialisasikan program KB seperti penyuluhan di posyandu ataupun dalam kegiatan konseling seperti door to door.

Ada pun beberapa instansi yang dilibatkan dalam peran KB sebagai penjalin kemitraan yaitu dengan beberapa pihak seperti Abri dan tokoh agama, lalu ikatan bidan Indonesia (IBI) berikut beberapa wawancara yang dilakukan dengan bapak Apai bahwa “Maksudnya berkoordinasi dengan berbagai pihak contohnya dengan rumah sakit pemerintah, lalu bidang Abri, nah Abri sendiri ada program(TMKK).”

Dalam hal ini PKB dan pihak BPMPKB saling bekerjasama menjalin kemitraan dengan beberapa pihak yang turut ikut ambil serta dalam program pemerintah. Contohnya Abri sebagai harus mau mendukung program yang diusung oleh pemerintah dan beberapa rumah sakit pemerintah harus mampu membantu dalam hal pelayanan program KB.

Kembali kedalam permasalahan di Kecamatan Kuta Baro. Banyak dari beberapa hal yang sulit dikomunikasikan membahas mengenai kemitraan terutama dengan beberapa tokoh masyarakat/agama yang fanatik dengan aspek keagamaan dan lingkungan itu sendiri, lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat

program KB. Seperti yang dibahas dalam teori atribusi yang dikemukakan Heider bahwa, faktor eksternal memberikan ambil alih sangat besar dalam membentuk pemahaman dan mainstet masyarakat mengenai program KB. Berikut beberapa pernyataan Venny Damayanti sebagai PKB dalam wawancara bahwa “Lalu ada beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dan mendukung program KB contohnya, Lurah Kecamatan Warungjaud, lalu PKB pun membutuhkan kader posyandu.”

Dari penggalan pernyataan yang diucapkan oleh PKB, faktor eksternal meliputi dari beberapa hal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan kader posyandu seperti bidan. Mengapa mereka memiliki ambil alih dalam suksesnya program KB?.Untuk tokoh masyarakat, seperti Lurah tentunya memiliki posisi yang sangat penting bagi masyarakat, Lurah dipandangan sebagai individu yang disegani oleh masyarakat, jika PKB mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Lurah dan memberikan pemahaman yang baik mengenai program KB, Lurah tersebut akan memberikan masukan kepada masyarakat akan baiknya program tersebut dan bermuara pada peningkatan jumlah peserta KB-Baru. Dan begitupun sebaliknya jika seorang PKB tidak dapat bekerjasama dan kurang menjalin komunikasi yang baik dengan Lurah, akan menimbulkan sebuah efek dimana Lurah akan kurang begitu memperhatikan program KB

kepada masyarakat sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PKB akan tidak efektif.

Tokoh agama seperti kita kenal dalam pembahasan sebelumnya, Kecamatan Kuta Baro masih sangat terkenal dengan aspek adat istiadat yang erat serta faktor keagamaan yang sangat kuat. Dalam aspek keagamaan tokoh agama memiliki posisi penting sebagai pengaruh yang besar kepada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro. Banyak dari beberapa tokoh agama masih memandang program KB sebagai program yang tidak sejalan dengan pemahaman agama Islam, bahkan ada beberapa tokoh agama menilai bahwa mengikuti program KB adalah “haram”. Pernyataan ini dijelaskan pada waktu wawancara dengan Rumsiah Pos KB Kecamatan Kuta Baro:

“Memang umumnya permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Kuta Baro dalam mensosialisasikan program KB adalah masyarakat yang masih awam, contohnya di Kecamatan Kuta Baro, ada seorang tokoh agama yang tidak setuju dengan program KB dan dia sangat mengkaitkan dengan aspek keagamaan yang tidak memperkenankan masyarakatnya untuk ikut program KB karena tokoh tersebut menilai bahwa menghalangi apa yang Tuhan beri kepada manusia itu bertentangan dengan agama. Karena menilai bahwa anak adalah anugrah.”

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tokoh agama memiliki ambil alih yang besar dalam kegiatan bermasyarakat di Kecamatan Kuta Baro, ini dapat menjadi sebuah masalah yang sangat urgent yang harus lebih diperhatikan oleh pihak PKB itu sendiri, karena masalah ini sudah sangat klasik ditemui di Kecamatan Kuta Baro. Masukan atas solusi agar tidak terjadi hal seperti ini diujarkan oleh Ibu Rumsiah Pos KB Kecamatan Kuta Baro bahwa “Harapan saya adalah setidaknya PKB seharusnya mampu menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan mampu memberikan pemahaman dan pengertian dengan baik kepada tokoh masyarakat”.

Meskipun hal tersebut tergolong sulit dalam menjalin kerjasama yang baik dengan tokoh agama tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan klasik tersebut mampu hilang sedikit demi sedikit jika PKB mau terjun langsung kepada masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik dan bertahap kepada tokoh agamanya, karena tidak semua tokoh agama di Kecamatan Kuta Baro menilai bahwa KB sebagai hal yang bertentangan dengan agama, contohnya seperti yang diucapkan oleh Ustad Tarjo, Kecamatan Kuta Baro bahwa “Jika dilihat dari programnya, KB memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, misalnya banyak anak kan pasti pula banyak

yang harus di penuhi kebutuhannya oleh anak tersebut nah disitu program KB berperan.”\

Dengan demikian tidak semua tokoh agama memandang bahwa program KB sebagai program yang bertentangan dengan agama, masih ada pula beberapa tokoh agamanya yang memandang KB sebagai program yang baik bagi masyarakat. Diharapkan tokoh agama yang mendukung program KB, dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan baiknya program KB.

Dalam permasalahan ini solusi mengenai hambatan lingkungan dan kebudayaan berhubungan dengan kemitraan, yang membahas mengenai sifat beberapa masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, adat istiadat sangat dipegang teguh oleh masyarakat di Kecamatan Kuta Baro. Sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bagaimana agama mengalami beberapa gesekan dengan program KB. Banyak dari beberapa masyarakat yang menilai KB adalah program yang haram, ini umum terjadi kepada masyarakat-masyarakat yang sangat fanatik dengan nilai-nilai keagamaan. Lalu bagaimana PKB menghadapinya? Menurut Venny Damayanti dalam penggalan wawancara bahwa Tentunya kami akan selalu menjunjung tinggi aspek kekeluargaan dalam menghadapi setiap

masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab kami.

Tidak dipungkiri bahwa pasti ada beberapa penolakan masyarakat yang tidak mendukung program KB dikarenakan berbenturan dengan aspek keagamaan, sangat sulit PKB masuk dalam ranah seperti itu, misalnya untuk berkunjung kerumah warga yang sangat memegang teguh aspek keagamaan. Dalam hal ini PKB bertindak sesuai dengan proream yang diusungnya yaitu program Keluarga Berencana dimana dalam program tersebut sangat erat kaitannya dengan aspek kekeluargaan. Bagaimana aspek kekeluargaan itu dilakukan? Misalnya ketika PKB akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, PKB tidak semena-mena melakukan penyuluhan seperti menjual produk KB. PKB terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan santun dan sopan, lalu menanyakan bagaimana kondisi keluarga masyarakat tersebut, apakah ada yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan/kekeluargaan atau tidak, setelah PKB melakukan pendekatan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut barulah PKB melakukan anjuran kepada masyarakat tersebut untuk menggunakan alkon sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ditemui bukan hanya membahas dengan aspek kependudukan atau jumlah anak yang ada di keluarga tersebut,

akan tetapi membahas pula mengenai aspek-aspek lain seperti kelayakan pemenuhan kebutuhan atau aspek ekonomi.

Bagaimana dengan masyarakat yang sudah sangat teguh dengan pendirian akan mainset program KB haram? Sering terjadi beberapa penolakan mengenai permasalahan tersebut. Contohnya ketika akan diadakannya sosialisasi lalu dipublikasikan di masjid menggunakan pengeras suara, ada beberapa tokoh agama yang melakukan penolakan terhadap hal tersebut dan terkesan “sangat mengganggu” berikut beberapa solusi yang dikemukakan oleh Venny Damayanti sebagai PKB menanggapi permasalahan bahwa “Akan tetapi jika ada beberapa pihak yang bertindak secara berlebihan kami tidak segan-segan memanggil pihak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam program KB yaitu Babinsa.”

Berkenaan dengan hal tersebut PKB mengemukakan akan menggunakan cara tegas dalam melakukan pemecahan masalah. Cara tegas ini diambil jika permasalahan sudah tergolong kepada tindakan yang berlebihan dan sudah sulit untuk dilakukannya pendekatan dengan masyarakat-masyarakat tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa

(1). PKB mengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di Gampong/Kecamatan, Kecamatan Kuta Baro, dengan cara melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan konseling yang berisikan mengenai program-program guna mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat peserta KB. PKB menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Gampong/Kecamatan, Kecamatan Kuta Baro. Ini terlihat dari pola penyampaian pesan dimana PKB merupakan top management untuk memberikan informasi mengenai program-program kepada masyarakat melalui Pos KB untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Tetapi peran sebagai penggerak masih kurang maksimal karena kompetensi seorang PKB yang kurang diantaranya penguasaan bahasa dan keahlian berkendara untuk pergi ke masing-masing Kecamatan.

(2). PKB memberdayakan masyarakat secara baik sesuai dengan perannya. Dimana ada beberapa program yang di usung oleh program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti BKR dan UPPKS. Program tersebut termasuk sebagai program pemberdaya masyarakat karena akseptor dianjurkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu menunjang perekonomian keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sejahtera. PKB masih kurang

maksimal dalam melakukan menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di Gampong/Kecamatan, Kecamatan Kuta Baro. Ini terlihat dari masih kurangnya komunikasi dan pendekatan dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Kuta Baro. Pendekatan dengan tokoh agama dinilai penting karena program KB dinilai program yang kontra dengan aspek keagamaan bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Kuta Baro.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla F, Naniek. 2011. *Komunikasi Persuasi*. Serang: SAYUTI.COM.
- Andre, Kukla. 2013. *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN. 2013. *Buku Panduan Praktis Prlayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Cangara, Hafied. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Devito, Josep A. 2012. *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Proffessional Books.
- Fuad, Anis dan Sapto Nugroho, Kandung. 2014 *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Garna, Yudistira K. 2014. *Metode Pelitian Kualitatif*. Bandung: The Judistira Foundation dan Primaco.
- Jafar, Ilham. 2011. *Pedoman Penyediaan Dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)*. Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2012. *Komunikasi Antarpribadi*. Kupang: PT. Citra Adiyta Bakti.
- Marhaeni Fajar. 2014. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyana, Dedi. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmat, Kriyantono. 2013, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. ALFABETA, cv.
- Widjaya. 2013. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Wiryanto. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo Persada.
- Yin Robert. 2012. *Studi Kasus, Gampong dan Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Huberman dan Miles, Matthew.B. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI- PRESS.
- Miles, Matthew.B. *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-PRESS.